EVALUASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT

(Studi Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu)

(Skripsi)

Oleh Apriliana



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2016

ABSTRACT

EVALUATION NATIONAL COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM (PNPM) Mandiri SAVINGS AND LOANS OF WOMEN (SPP) INCREASE IN ECONOMIC AND SOCIAL WELFARE

(Study the District of Sukoharjo District Pringsewu)

By:

Apriliana

This study aims to assess the evaluation of the National Program for Community Empowerment (PNPM) independent women's credit (SPP) in improving the welfare of society and the economy. The method used in this type of qualitative descriptive study. Data collection technique used observation, interview and documentation study. Mechanical determination informant used purposive sampling with 11 informants. The results of the study the women's credit program (SPP) are (1) to assist poor households (RTM) which has a productive effort to develop a variety of existing business. (2) Provides easy access to business capital good to the community as beneficiaries of a business group. (3) Increase employment opportunities. (4) Develop productive business and women's groups. (5) Enhancing the quality of human resources and groups to achieve a prosperous society. (6) Increasing economic growth. (7) Fostering a sense of brotherhood that need each other. Officers and members are expected to help smooth the women's credit program (SPP) with no constraints or other problems.

Keywords: Women's Savings and Loan Program (SPP), Welfare Improvement of economy, society

ABSTRAK

EVALUASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT

(Studi Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu)

Oleh:

Apriliana

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Metode yang digunakan dalam ini bertipe penelitian deskritif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah purposive sampling dengan jumlah informan 11 orang. Hasil dari penelitian program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini adalah (1) Dapat membantu Rumah Tangga Miskin (RTM) yang memiliki usaha produktif untuk mengembangkan aneka usaha yang sudah ada. (2) Memberi kemudahan akses permodalan usaha baik kepada masyarakat sebagai pemanfaat kelompok usaha. (3) Menambah kesempatan kerja. (4) Menumbuhkembangkan usaha produktif dan kelompok perempuan. Mempertinggi kualitas sumberdaya manusia dan kelompok untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. (6) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. (7) Menumbuhkan rasa persaudaraan yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Pengurus dan anggota diharapkan dapat membantu kelancaran program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tanpa ada kendala ataupun masalah-masalah lainnya.

Kata Kunci : Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP), Kesejahteraan, Peningkatan perekonomian, Masyarakat

ABSTRAK

EVALUASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT

(Studi Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu)

Oleh:

Apriliana

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Metode yang digunakan dalam ini bertipe penelitian deskritif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah purposive sampling dengan jumlah informan 11 orang. Hasil dari penelitian program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini adalah (1) Dapat membantu Rumah Tangga Miskin (RTM) yang memiliki usaha produktif untuk mengembangkan aneka usaha yang sudah ada. (2) Memberi kemudahan akses permodalan usaha baik kepada masyarakat sebagai pemanfaat kelompok usaha. (3) Menambah kesempatan kerja. (4) Menumbuhkembangkan usaha produktif dan kelompok perempuan. Mempertinggi kualitas sumberdaya manusia dan kelompok untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. (6) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. (7) Menumbuhkan rasa persaudaraan yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Pengurus dan anggota diharapkan dapat membantu kelancaran program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tanpa ada kendala ataupun masalah-masalah lainnya.

Kata Kunci : Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP), Kesejahteraan, Peningkatan perekonomian, Masyarakat

ABSTRACT

EVALUATION NATIONAL COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM (PNPM) Mandiri SAVINGS AND LOANS OF WOMEN (SPP) INCREASE IN ECONOMIC AND SOCIAL WELFARE

(Study the District of Sukoharjo District Pringsewu)

By:

Apriliana

This study aims to assess the evaluation of the National Program for Community Empowerment (PNPM) independent women's credit (SPP) in improving the welfare of society and the economy. The method used in this type of qualitative descriptive study. Data collection technique used observation, interview and documentation study. Mechanical determination informant used purposive sampling with 11 informants. The results of the study the women's credit program (SPP) are (1) to assist poor households (RTM) which has a productive effort to develop a variety of existing business. (2) Provides easy access to business capital good to the community as beneficiaries of a business group. (3) Increase employment opportunities. (4) Develop productive business and women's groups. (5) Enhancing the quality of human resources and groups to achieve a prosperous society. (6) Increasing economic growth. (7) Fostering a sense of brotherhood that need each other. Officers and members are expected to help smooth the women's credit program (SPP) with no constraints or other problems.

Keywords: Women's Savings and Loan Program (SPP), Welfare Improvement of economy, society

EVALUASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT

(Studi Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu)

Oleh

Apriliana

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar SARJANA SOSIOLOGI

Pada Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERAITAS LAMPUNG BANDARLAMPUNG 2016 Judul Skripsi

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT

(Studi Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu)

Nama Mahasiswa

: Apriliana

No. Pokok Mahasiswa

: 1216011017

Jurusan

: Sosiologi

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUJ

1. Komisi Pemberabing

Dra. Paraswati Daril Milyan NIP 19550930 198902 2 001

2. Ketua Jurusan Sosiologi

Drs. Susetyo, M.Si.

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Dra. Paraswati Daril Milyan

Penguji Utama : Dra. Anita Damayantie, M.H.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Drs. Hi. Agus Hadiawan, M.Si.

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 25 Juli 2016

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

- Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (Master/Sarjana/Ahli Madya), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
- 2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
- Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
- 4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 29 Juni 2016 Yang membuat pernyataan,



RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Apriliana. Lahir di Pringsewu, pada tanggal 07 April 1995. Penulis merupakan anak ke lima dari enam bersaudra , dari pasangan Bapak Rusmanto dan Ibu Sri Poniasih. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini penulis beralamat di Pringsewu Utara Kecamatan Pringsewu Kabupaten

Pringsewu.

Pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis:

- 1. Sekolah Dasar Negeri 6 Pringsewu yang diselesaikan pada tahun 2006.
- 2. SMP Muhammadiyah 01 Pringsewu yang diselesaikan pada tahun 2009.
- 3. SMA Negeri 2 Pringsewu yang diselesaikan pada tahun 2012.

Pada tahun 2012 penulis diterima sebagai mahasiswa Universitas Lampung di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Sosiologi. Pada Januari 2015 penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata di Desa Bumi Jaya Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan. Pada semester akhir tahun 2016 penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul "Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Dan Perekonomian Masyarakat (Studi Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu).

Motto

"Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan"

(Al-Mujadillah:11)

"Arah yang diberikan pendidikan adalah untuk mengawali hidup seseorang akan menentukan masa depannya" (Plato)

"Tujuan dari pendidikan adalah untuk menggantikan pemikiran yang tertutup dengan yang terbuka"

(Malcolm Forbes)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah..

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran, serta kelancaran untukku dalam mengerjakan skripsi ini.

Sebuah karya kecil yang kupersembahkan untuk Bapak dan Ibuku tercinta, sebagai ungkapan bakti dan rasa hormat atas jerih payah, didikan, serta do'a yang tiada henti, terimakasih atas segalanya.

Terimakasih juga kuucapkan kepada keluarga besarku yang selalu memberi semangat dan do'anya.

Sahabat-sahabatku tercinta yang selalu menemaniku dalam suka dan duka.

Almamater Tercinta Universitas Lampung.

SANWACANA

Penulis menghaturkan Puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, pemilik segala keagungan. Dengan ridho dan rahmat-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Dalammeningkatkan Kesejahteraan Dan Perekonomian Masyarakat (Studi Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu). Penulis sadar dan merasa bahwa skripsi ini masih jauh dari kata "sempurna", hal ini dikarenakan masih banyak keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis. Dari awal hingga akhir penulisan ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

- Bapak Drs. Hi. Agus Hadiawan M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
- Bapak Drs. Susetyo M.Si, selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
- Ibu Dra. Paraswati Darimilyan selaku Pembimbing Utama yang selalu mendukung, membantu, dan sabar memberi masukan selama proses bimbingan hingga skripsi ini selesai. Terima kasih untuk semua ilmu yang Ibu berikan.

- 4. Ibu Dra. Anita Damayantie, M.H selaku Penguji Utama yang selalu memberikan kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini. Terima kasih banyak Ibu.
- 5. Bapak Teuku Fahmi, S.Sos, M.Krim selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dalam masa perkuliahan.
- 6. Bapak dan Ibu Dosen FISIP Unila yang telah membagi ilmu pengetahuannya kepada penulis serta staf akademik dan karyawan FISIP Unila atas segala kemudahan dan bantuannya.
- 7. Bapak dan Ibuku tersayang, terima kasih untuk kasih sayang, kesabaran, doa pengorbanan dan didikan selama ini yang bapak dan ibu berikan. Maaf baru ini yang dapat aku persembahkan untuk kalian. Semoga dengan terselesaikannya skripsi ini menjadi awal kesuksesanku sehingga bapak dan ibu bangga mempunyai anak sepertiku.
- 8. Kepala Desa Bumi Jaya beserta aparat desa lainnya, terima kasih atas kemudahan yang diberikan ketika saya melakukan penelitian.
- Bapak Basroni selaku lurah kecamatan Sukoharjo beserta Staf, terima kasih atas bantuannya selama ini.
- 10. Kepala Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) bapak Rustamadi beserta Staf dan warga Kecamatan Sukoharjo khususnya para informan, terima kasih atas penerimaannya yang baik dan semua informasi yang telah diberikan.
- Untuk kakak teristimewaku, Tuti Rusmiati, S.Pd dan Cicih Mugiarti, S.Pd.
 Terimakasih dukungan, doa, bantuan dan kebersamaanya selama ini.
- 12. Untuk Suamiku Rahmat Rahman terima kasih atas dukungan doa dan penyemangat selama ini.

13. Untuk Tim suksesku, Laela Kurnia Khairani, Ika Desiana, S.Sos, Safitri Ning Rahayu, S.Sos, Septini Diandini, Silvia Lazulka, Ni Wayan Sri Rasmiyanti, Vidya Ayu Ningtyas Risti, Novita Rianti KD, Ela Widiawati, S.Sos, Marlia Safitri, dan rekan-rekan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terimakasih sahabat atas doa dan bantuan serta kebersamaannya selama ini, kalian tidak akan terlupakan.

14. Untuk teman-teman sosiologi angkatan 2012 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaan kalian.

15. Untuk Keluarga KKN Desa Bumi Jaya Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan, Mbah, mas Ijroh dan sekeluarga, pak lurah dan bu lurah, pak carek, mas budi, fajar, warits, putu, dina, liliana, elsa dan semua warga desa Bumi Jaya, Terima kasih kebersamaan 40 hari dan untuk pelajaran berharganya.

16. Terima kasih untuk semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi harapan penulis semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat.

Bandar Lampung, Agustus 2016 Penulis

Apriliana

DAFTAR ISI

	Н	alaman			
DA	AFTAR ISI				
DAFTAR TABEL					
DA	DAFTAR GAMBAR				
I.	PENDAHULUAN				
	A. Latar Belakang Masalah	. 1			
	B. Rumusan Masalah	. 6			
	C. Tujuan Penelitian	. 6			
	D. Manfaat Penelitian	. 7			
II.	KAJIAN PUSTAKA				
	A. Tinjauan Evaluasi	. 8			
	B. Tinjauan PNPM-Mandiri	. 12			
	C. Tinjauan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	. 16			
	D. Proses dan tahapan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang telah diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SPP) Kecamatan Sukoharjo	. 19			
	E. Tinjauan Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat	. 29			
	F. Kerangka Berfikir	. 31			
III	. METODE PENELITIAN				
	A. Tipe Penelitian	. 34			
	B. Lokasi Penelitian	. 35			
	C. Fokus Penelitian	. 35			
	D. Teknik Penentuan Informan	36			

	E. '	Teknik Pengumpulan Data	38
	F. '	Teknik Analisa Data	39
IV.	GA	MBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
	A.	Keadaan Geografis Kecamatan Sukoharjo	42
		1. Letak Administratif	42
		2. Luas Wilayah	44
		3. Keadaan Sosial Ekonomi Kecamatan Sukoharjo	45
		4. Sejarah Berdirinya Kecamatan Sukoharjo	46
		5. Keadaan penduduk Kecamatan Sukoharjo	47
		6. Keadaan Ekonomi	51
		7. Pemerintahan Kecamatan Sukoharjo	52
v.	HA	ASIL DAN PEMBAHASAN	
	A.	Identitas Informan	54
	B.	Hasil tentang Program Simpan Perempuan (SPP) di Kecamatan Sukoharjo	59
	C.	Evaluasi dari hasil wawancara para anggota Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	68
	D.	Proses dari hasil wawancara para anggota Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	70
	E.	Hasil dari Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	71
	F.	Manfaat program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari Wawancara	73
VI.	KE	CSIMPULAN DAN SARAN	
	A.	Kesimpulan	76
	B.	Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman	
1.	Penjelasan Perhitungan	18	
2.	Profil Informan	37	
3.	Luas Kecamatan Sukoharjo Menurut Penggunaan Tanah Tahun 2015	44	
4.	Distribusi Jumlah Penduduk Kecamatan Sukoharjo Berdasarkan Jenis Kelamin	47	
5.	Distribusi Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur	48	
6.	Komposisi penduduk menurut etnis/suku	49	
7.	Komposisi Penduduk Menurut Agama	50	
8.	Komposisi penduduk menurut pekerjaan	50	
9.	Data monografi Kecamatan Sukoharjo pada tingkat Kesejahteraan penduduk	52	
10.	Profil Informan	58	

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman	
1.	Kerangka Pikir	33	
2.	Peta kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu berdasarkan google maps	43	
3.	Struktur Pemerintahan Kecamatan Sukoharjo	53	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan dalam meningkatkan taraf hidup maupun peningkatan perekonomian di dalam masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan Pemerintah membentuk suatu program pemberdayaan masyarakat, yang bertujuan untuk menanggulangi kesejahteraan masyarakat yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

Pada tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan adalah keberlanjutan dari Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang telah ada sejak tahun 1999. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Latar belakang adanya PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang mulai ditetapkan pada tahun 1998. Jadi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) ini berganti Program menjadi Progran Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pada tahun 2008.

Program PNPM Mandiri khususnya Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (*Sosial Capital*) masyarakat di masa mendatang dalam menanggulangi kemiskinan yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat.

Program pemberdayaan masyarakat ini memberikan bantuan dana sebesar Rp. 1 miliar sampai Rp. 3 miliar per kecamatan melalui program PNPM-Mandiri ini. Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan pun seluruh anggota masyarakat terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Sumber http://www. Pnpm-mandiri. Org. tahun. 2008

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Kabupaten Pringsewu dimulai pada tahun 2007, dimana pada saat itu Kabupaten Pringsewu masih merupakan bagian dari Kabupaten Tanggamus. kemudian terjadi pemekaran Kabupaten, dimana Kabupaten Pringsewu merupakan Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Tanggamus sejak tahun 2009, dengan jumlah 8 kecamatan yakni; Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Pardasuka, Kecamatan

Pagelaran, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Adiluwih, Kecamatan Banyumas, sedangkan dari pemekaran Kabupaten tersebut awalnya terdapat 4 Kecamatan yang mendapatkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di tahun 2007 yaitu: Kecamatan Pardasuka, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Gadingrejo dari tahun 2007–2013. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri ini berlangsung dari tahun 2007-2013 dengan bantuan yang ditentukan sebesar Rp. 1 milyar hingga Rp. 3 milyar dan dikeluarkan secara bertahap, Kecamatan ini telah berpartisipasi dalam Program Nasional Pemberdayaan Perempuan (PNPM) sejak tahun 2007, dan mulai tahun 2013 sampai sekarang bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri ini tidak mendapat bantuan lagi, namun Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri khususnya Kecamatan Sukoharjo ini telah beralih menjadi Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) berdiri pada tahun 2013 dengan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Secara umum pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Kecamatan Pardasuka dinilai berhasil dibandingkan dengan kecamatan Gadingrejo, Pagelaran, dan Pardasuka yang mendapat bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri belum bisa berhasil seperti Kecamatan Sukoharjo. Hal ini dapat dilihat dari jumlah aset produktif seperti ladang 33, 76 ha, perkebunan rakyat 14, 47 ha, persawahan 11, 82 ha dan dana bergulir simpan pinjam yang dikelola Badan Kerjasama Antar Desa

(BKAD) Kecamatan Sukoharjo. Hingga akhir Bulan Juli 2015, jumlah aset dana bergulir simpan pinjam, khusus perempuan yang dikelola (Badan Kerjasama antar Desa) (BKAD) kecamatan Sukoharjo mencapai Rp. 3, 4 miliar lebih. Dari jumlah aset dana simpan pinjam yang mencapai Rp. 3, 4 miliar lebih ini, sampai saat ini Simpan Pinjam Perempuan (SPP) memilki sekitar 228 kelompok usaha yang meminjam dana bergulir.

Dana bergulir merupakan upaya memberikan jaminan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan, baik dari sisi aspek pemberdayaan, sistem dan proses perencanaan, aspek dukungan pemerintahan serta aspek prinsip-prinsip PNPM harus mampu memberikan perubahan positif. Mata pencaharian masyarakatnya mayoritas adalah petani, pedagang kecil, industri rumah tangga dan peternakan, dengan potensi sumberdaya alam yang potensial adalah pasir. Adapun produk unggulannya adalah padi, kakao dan jagung.

Pemerintah Kabupaten Pringsewu akan selalu mendukung programpemberdayaan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menyerahkan bantuan sosial berupa sembako, peralatan sekolah, bantuan bagi para lansia, anak yatim piatu serta penyandang keterbatasan mental dan fisik dilaksanakan di 16 pekon (desa) se-Kecamatan Sukoharjo ini membuktikan masyarakat Kecamatan berhasil bahwa Sukoharjo melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.

Dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) pada dasarnya terdiri atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandri Perdesaan terbagi dalam tiga aspek kegiatan meliputi, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur (seperti pembangunan jalan dan perbaikan gorong-gorong aliran air), bantuan langsung masyarakat (pembagian sembako, peralatan sekolah dan biaya sekolah) dan peningkatan kapasitas masyarakat berupa dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dana bergulir yang bersifat pinjaman dari BKAD (Badan Kerjasama antar Desa) melalui UPK (Unit Pengelola Kegiatan) yang digunakan oleh masyarakat untuk menandai kegiatan ekonomi masyarakat yang disalurkan oleh kelompok-kelompok masyarakat. Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) sudah melaksanakan aspek tersebut.

Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini dilakukan dengan adanya proses, dimana proses ini sangat membantu para anggota untuk mengikuti semua program kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini. Suatu program juga tidak akan berjalan jika tidak ada proses-proses yang harus dijalankan, jika tidak ada proses mungkin akan terjadi masalah-masalah dalam menjalankan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini, proses menjadi bagian yang penting dalam menjalankan aturan yang sudah ada, maka akan mendapatkan hasil dari program Simpan Pinjam Perempuan (SPP), hasil ini dapat dilihat dari tingkat keberhasilan kelompok usaha produktif dalam menjalankan usahanya menjadi lebih maju atau meningkat, baru

menghasilkan manfaat baik untuk para anggota maupun masyarakat yang tidak terlibat.

Maka dari itu aspek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) inilah yang menjadi objek peneliti karena sangat membantu kelompok perempuan yang memiliki potensi usaha produktif dan merupakan Rumah Tangga Miskin (RTM). Oleh karena itu, dipandang perlu untuk melakukan penelitian tentang: "Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Dan Perekonomian Masyarakat (Studi Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini dapatdirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana evaluasi (mencakup proses , hasil, dan manfaat) program simpan pinjam perempuan (SPP) yang telah begulir dari adanya dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui proses, hasil yang dicapai, dan manfaat pelaksanaan Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

- Bagi masyarakat dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan program simpan pinjam khusus perempuan dalam pemberdayaan masyarakat.
- b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang diteliti oleh penulis.

2. Secara praktis

- a. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan program pemberdayaan masyarakat khususnya Simpan Pinjam Perempuan (SPP).
- Bagi masyarakat dapat mengetahui tentang proses, hasil, manfaat pelaksanaan Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyara

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Evaluasi

1. Pengertian Evaluasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, evaluasi adalah suatu penilaian dimana penilaian itu ditujukan pada orang yang lebih tinggi atau yang lebih tahu kepada orang yang lebih rendah, baik itu dari jabatan strukturnya atau orang yang lebih rendah keahliannya. Evaluasi adalah suatu proses penelitian positif dan negatifatau juga gabungan dari keduanya (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978). Pada umumnya evaluasi adalah suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan dan yang akan digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program kedepannya agar jauh lebih baik. Evaluasi lebih bersifat melihat kedepan dari pada melihat kesalahan-kesalahan dimasa lalu, dan ditujukan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program, dengan demikian misi dari evaluasi itu adalah perbaikan atau penyempurnaan di masa mendatang atas suatu program.

Menurut Yusuf (2000) evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan sumber nilai secara objektif dari pencapaian hasil-hasil yang direncanakan

sebelumnya, dimana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan di depan. Dalam hal ini Yunus menitikberatkan kajian evaluasi dari segi manajemen, dimana evaluasi itu merupakan salah satu fungsi atau unsur manajemen, yang misinya adalah untuk perbaikan fungsi atau sosial manajemen lainnya, yaitu perencanaan.

Selain itu menurut Jones (1994) mengungkapkan evaluasi adalah suatu aktivitas yang dirancang untuk menimbang manfaat program dalam spesifikasi kriteria, teknik pengukuran, metode analisis dan bentuk rekomendasi. Selanjutnya Weiss (dalam Jones, 1994) mengemukakan bahwa evaluasi adalah kata *riteri* yang meliputi segala macam pertimbangan, penggunaan kata tersebut dalam arti umum adalah suatu istilah untuk menimbang manfaat. Seseorang meneliti atau mengamati suatu fenomena berdasarkan ukuran yang eksplisit dankriteria. Boyle (dalam Suharto, 2005) evaluasi dilakukan untuk dapat mengetahui dengan pasti pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yangdijumpai dalam pelaksanaan rencana strategi yang dapat dinilai dan dipelajari untuk menjadi acuan perbaikan dimasa mendatang.

Sosial utama dari evaluasi adalah diarahkan kepada keluaran (output), hasil (outcomes), dan dampak (impacts) dari pelaksanaan rencana stategis. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan yang transparan dan akuntabel dan harus disertai dengan penyusunan sosial kinerja pelaksanaan rencana yang sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Sosial masukan
- b. Sosial keluaran
- c. Sosial hasil

Lebih jauh lagi, evaluasi berusaha mengidentifikasikan mengenai apa yang sebenarnya yang terjadi pada pelaksanaan atau penerapan program.

2. Evaluasi bertujuan untuk:

- 1) Mengidentifikasikan tingkat pencapaian tujuan
- 2) Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran
- Mengetahui dan menganalisa konsekuensi-konsekuensi lain yang mungkin terjadi diluar sosial

Menurut Suharto (2006) jenis-jenis evaluasi Jika dilihat dari pertahapannya, secara umum evaluasi dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

a. Evaluasi tahap perencanaan

Yaitu evaluasi yang digunakan dalam tahap perencanaan untuk mencoba memilih dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai alternatif dan kemungkinan terhadap cara pencapaian tujuan yang ditetapkan sebelumnya.

b. Evaluasi pada tahap pelaksanaan

Pada tahap ini evaluasi adalah suatu kegiatan yang melakukan analisa untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding dengan rencana. Terdapat perbedaan antara konsep menurut penelitian ini dengan monitoring. Evaluasi bertujuan terutama untuk mengetahui

apakah yang ingin dicapai sudah tepat dan bahwa program tersebut direncanakan untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Sedangkan monitoring bertujuan melihat pelaksanaan proyek sudah sesuai dengan rencana dan bahwa rencana tersebut sudah tepat untuk mencapai tujuan, sedangkan evaluasi melihat sejauh mana proyek masih tetap dapat mencapai tujuan, apakah tujuan tersebut sudah berubah dan apakah pencapaian program tersebut akan memecahkan masalah yang akan dipecahkan.

3. Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan

Dalam hal ini konsep pada tahap pelaksanaan, yang membedakannya terletak pada objek yang dinilai dengan yang dianalisa, dimana tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding rencana tetapi hasil pelaksanaan dibanding dengan rencana yakni apakah dampak yang dihasilkan oleh pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang akan ingin dicapai.

4. Fungsi Evaluasi

Menurut Wahab (2002) evaluasi memiliki tiga fungsi utama dalam analisis kebijakan, yaitu:

a. Evaluasi memberi informasi yang salah dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai.

- b. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilainilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas denganmendefenisikan dan mengoperasikan tujuan dantarget.
- c. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadai kinerja kebijakan yang dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan

Berdasarkan fungsi-fungsi evaluasi yang telah dikemukakan diatas, maka dapatlah kita simpulkan tentang nilai evaluasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut.

B. Tinjauan PNPM-Mandiri

Konsep Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaanberangkat dari komplesitas permasalahan tersebut, Pemerintah telah menelurkan beragam program dimana salah satunya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebagai program pemberdayaan terbesar di Indonesia lahir atas dasar keprihatin atas masalah kemiskinan di Indonesia. Semenjak diberlakukannya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri dari tahun 2003 yang dulunya bernama Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang kemudian diperluas menjadi Program

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) secara nasional sejak tahun 2007 memiliki visi tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

- a. Misi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri Perdesaan adalah:
 - 1) Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya;
 - 2) Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif;
 - 3) Pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal;
 - 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat;
 - 5) Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri Perdesaan, strategi yang dikembangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan. Sumber http://www. Pnpm-mandiri. Org. tahun. 2008

b. Tujuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
 Perdesaan

Tujuan Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Tujuan khususnya meliputi:

- 1) Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan
- 2) Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal
- 3) Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif
- 4) Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat
- 5) Melembagakan pengelolaan dana bergulir
- 6) Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa

- Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan
- c. Prinsip Dasar Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

 Mandiri Perdesaan

Sesuai dengan Pedoman Umum, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan mempunyai prinsip atau nilainilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Prinsip-prinsip itu meliputi:

- 1) Bertumpu pada pembangunan manusia
- 2) Otonomi
- 3) Desentralisasi
- 4) Berorientasi pada masyarakat miskin
- 5) Partisipasi
- 6) Kesetaraan dan keadilan gender
- 7) Demokratis
- 8) Transparansi dan Akuntabel
- 9) Prioritas
- 10) Keberlanjutan

Ketentuan Dasar Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Mandiri PerdesaanKegiatan yang akan dibiayai melalui dana BLM

diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria:

- 1) Lebih bermanfaat bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin
- 2) Berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan
- 3) Dapat dikerjakan oleh masyarakat
- 4) Didukung oleh sumber daya yang ada
- 5) Memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan

Sumber http://www. Pnpm-mandiri. Org. tahun. 2008

C. Tinjauan simpan pinjam perempuan (SPP)

Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan bagi masyarakat diperdesaan dengan cara memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) seluruh masyarakatnya di dorong untuk semua terlibat dalam setiap tahap kegiatan secara partisipatif khususnya untuk Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) yang anggotanya di khususkan untuk kelompok perempuan yang merupakan kegiatan pemberian permodalan kepada kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tersebut.

Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) memberikan bantuan pinjaman dana kepada kelompok perempuan yang berasal dari golongan rumah tangga miskin untuk membantu pengembangan usaha yang mereka miliki, sehingga

nantinya dapat meningkatkan jumlah penghasilan yang mereka peroleh dari usaha yang telah mereka miliki. Pemberian bantuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kepada kelompok perempuan tersebut harus memihak kepada rumah tangga yang berasal dari golongan rumah tangga miskin.

Bantuan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini diberikan dengan rentang waktu yang telah ditentukan oleh tim penggerak kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), yaitu maksimal 18 bulan untuk penyalur pinjaman *Channeling* sedangkan untuk kelompok pengelola pinjaman *executing* 36 bulan. Dalam hal ini pemberian bantuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) juga tidak ada unsur yang mewajibkan si peminjam harus memberikan jaminan. Baik itu jaminan berupa barang, maupun dokumen-dokumen penting yang mereka miliki, hanya saja kelompok peminjam harus dapat mengembalikan pinjaman tersebut tepat pada waktu yang telah ditetapkan tadi. Dalam kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), ditentukan satu orang yang ada di dalam kelompok tersebut yang dapat dijadikan sebagai ketua kelompok. Sesuai dengan yang dikemukan pada latar belakang.

Ketua kelompok bertanggung jawab dalam mengkoordinir seluruh anggotanya dalam hal pemanfaat dan pengembalian dana pinjaman tersebut. Pemberian dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini bersifat kredit. Yang mana kelompok peminjam harus mengembalikan dana pinjaman tersebut kepada ketua kelompok kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tersebut sebesar 18%. Dan kemudian, ketua kelompok tersebut mengembalikan dana pinjaman

tersebut kepada tim penggerak kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) setiap bulannya sebesar 18% dari besarnya dana pinjaman yang diperoleh. 18% merupakan bunga yang telah ditentukan dari Pemerintah Daerah yang harus dikembalikan kepada Pemerintah Daerah dalam satu tahun. Suku bunga yang harus dikembalikan setiap individu adalah 1,5% perbulan dari hasil peminjaman.

Tabel 1. Penjelasan Perhitungan Simulasi pinjaman program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kabupaten Pringsewu

Pinjaman Pihak III	10%
Biaya Operasional	3%
Resiko Pinjaman	2%
Margin Keuntungan	3%
Suku Bunga Yang Ditetapkan (Jumlah)	18%

Sumber: data Standar Operasional Prosedur SOP Kabupaten Pringsewu

Jadi setiap anggota wajib mengembalikan angsuran pinjaman tersebut kepada ketua kelompok, setelah itu barulah ketua kelompok yang menyetorkan pengembalian dana tersebut kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK).

Dalam pelaksanaannya program simpan pinjam khusus perempuan dilaksanakan melalui beberapa tahap sebelum proses pengajuan pinjaman, sebelum mengajukan pinjaman masyarakat penerima manfaat harus bentuk kelompok yaitu Kelompok Usaha Bersama (KUB), dalam satu kelompok sekurang-kurangnya 5 orang atau bisa mencapai 15 orang kemudian dalamsatu kelompok mengajukan proposal ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK).

- D. Proses dan tahapan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang telah diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SPP) Kecamatan Sukoharjo
 - Proses dan tahapan yang telah diatur Undang-Undang nomor 6 Tahun
 2014 (tentang desa)
 - a. Pelaksanaan Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dilaksanakan melalui beberapa proses tahapan yaitu:
 - Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi dimana pada tahapan ini dilakukan pengenalan awal pada masyarakat desa agar memahami adanya program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan khususnya Simpan Pinjam Perempuan (SPP) agar dapat dimanfaatkan dengan baik.
 - 2) Musyawarah Desa (Musdes) Sosialisasi sebagai ajang penyebarluasan informasi mengenai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat Desa.
 - 3) Musyawarah Khusus Perempuan (MKP) yaitu dimana di dalamnya dihadiri oleh kaum perempuan yang dilakukan untuk membahas gagasandari kelompok perempuan dan menetapkan usulan yang merupakanusulan perempuan, dalam tahapan ini juga dilakukan Pengajuan proposal.
 - 4) Verifikasi yaitu adalah tahapan untuk memeriksa dan menilai kelayakanusulan setiap kelompok yang mengajukan proposal.

- 5) Musyawarah Antar Desa (MAD) Prioritas Usulan yaitu tahapan ini merupakan tahapan evaluasi akhir dengan model kompetisi dengan mempertimbangkan hasil verifikasi.
- 6) Musyawarah Antar Desa (MAD) Penetapan Usulan pada tahap ini keputusan mencakup pendanaanusulan dengan menentukan kelompok-kelompok yang telah memenuhi syarat perangkingan dapat didanai dengan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM-MP.
- 7) Pencairan Dana, tahapan ini dilakukan setelah adanya dana dari pusat.
- 8) Pengembalian Dana, yaitu tahapan akhir dari program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dimana pada tahap ini dilakukan proses pengangsuran oleh kelompok-kelompokpeminjam.

2. Perencanaan Perguliran sesuai dengan pasal 9 yaitu:

- a. Perencanaan perguliran dana dibahas dalam forum Musyawarah Antar
 Desa (MAD) Baik bersamaan dengan Forum Musyawarah Antar Desa
 (MAD) regular Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
 maupun Forum Musyawarah Antar Desa (MAD) yang dilaksanakan
 secara khusus.
 - Masalah yang di bahas oleh Musyawarah Antar Desa (MAD) tersebut meliputi:
 - a) Laporan perkembangan kegiatan
 - b) Laporan neraca keuangan dan status dana yang siap digulirkan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

- c) Laporan pertanggungjawaban keuangan apabila perguliran melebihi dana pengembalian yang masuk dengan cara menutup laporan keuangan pada periode bersangkutan
- d) Tanggapan, usul dan saran mengenai pengelolaan dana perguliran

2) Penetapan peraturan perguliran dana

- a) Jumlah dan daftar kelompok berhak berpartisipasi
- b) Jumlah maksimal dana yang akan digulirkan ke masingmasing kelompok, baik kelompok yang sebelumnya telah mendapat dana maupun kelompok yang pernah berpartisipasi tetapi belum mendapat dana
- c) Penggunaan modal usaha di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang akan digulirkan
- d) Jumlah perguliran/ proposal perkelompok
- e) Kriteria penilaian perguliran kegiatan yang harus dipenuhi oleh masing-masing kelompok pengusul
- f) Besarnya jasa pinjaman yang harus dibayar
- g) Sanksi jika terjadi keterlambatan pengembalian dan pembayaran jasa pinjaman
- h) Penetapan Tim Verifikasi Perguliran
- 3. Proses yang harus dilakukan meliputi persyaratan kelompok pinjaman perguliran Sesuai dengan pasal 14 yaitu:

- a. Kelompok peminjam harus mempunyai ikatan pemersatu yang kuat,
 misalnya Rukun Tetangga/Rukun Warga, Dasa Wisma, PKK, Arisan
 Tahlilan, Yasinan dan lain sebagainya
- Mempunyai kepengurusan yang jelas minimal ketua, sekertaris,
 bendahara
- c. Mempunyai kegiatan ekonomi dan kemasyrakatan
- d. Anggota kelompok yang menjadi pemanfaat benar-benar warga desa setempat atau warga kecamatan Sukoharjo dibuktikan dengan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku
- e. Anggota kelompok peminjam wajib mendapatkan persetujuan dari salah satu anggota keluarganya dan diketahui oleh RT atau RW setempat
- f. Pengurus tingkat desa ataupun tingkat kecamatan (pelaku atau istrinya) tidak diperkenankan menerima pinjaman dari dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kecuali mendapat persetujuan dari UPK (Unit Pengelola Kegiatan) dan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)
- g. Kelompok lunas yang akan mengajukan kembali pinjamannya harus dinilai kondisi pinjamannya:
 - Jika tidak pernah menunggak pinjaman dapat ditingkatkan dari pinjaman sebelumnya
 - Jika pernah menunggak atau masuk kolektibilitas III, maka pengajuannya sama dengan pinjaman sebelumnya

- Jika mempunyai catatan tunggakan sampai dengan kolektibilitas
 III maka pengajuan maksimal 75% dari sebelumnya
- h. Kelompok peminjam:
- 4. Kelompok penyalur pinjaman (channeling) dengan persyaratan tambahan:
 - a. Umur kelompok antara 0-3 tahun
 - b. Kelompok minimal mempunyai pengurus yang jelas
 - c. Minimal mempunyai buku notulen/catatan dan atau buku kas harian
 - d. Minimal mempunyai kegiatan rutin, minimal pertemuan
 - e. Anggota kelompok yang meminjam bagi kelompok baru minimal 5
 orang dan maksimal 10 orang dan bagi kelompok lama maksimal 15
 orang
 - f. Dalam satu kelompok yang meminjam tidak boleh terdiri dari ayah, ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya yang masuk dalam satu kartu keluarga
 - g. Kelompok wajib memiliki tabungan kelompok sebesar 10% dari besaran pengajuan pinjaman, selanjutnya tabungan tersebut sebagai tanggungan
 - h. Anggota kelompok diwajibkan mengikuti asuransi jiwa untuk mengantisipasi kemacetan apabila terjadi hal yang tidak diharapkan
- 5. Kelompok pengelola pinjaman (*executing*) dengan persyaratan tambahan meliputi:
 - a. Umur kelompok minimal 5 tahun

- Mempunyai pengalaman mengelola dana simpanan dan pinjaman minimal 3 tahun
- c. Mempunyai anggrana dasar/anggaran rumah tangga secara tertulis
- d. Mempunyai aturan kepengurusan secara tertulis
- e. Mempunyai aturan pengelolaan dana simpanan dan pinjaman (mencakup jenis-jenis simpanan, bunga simpanan, persyaratan pinjaman jumlah pinjaman, jangka waktu sanksi) secara tertulis
- f. Tunggakan pinjaman yang ada dikelompok maksimal 20% dari target pengembalian
- g. Maksimal pengajuan pinjaman 200% dari tabungan kelompok dan modal kelompok
- Kelompok wajib mempunyai tabungan kelompok sebesar minimal
 10% dari besran pengajuan pinjaman, selanjutnya tabungan tersebut sebagai tanggunan
- i. Bagi kelompok executing dapat mengajukan gabungan pinjaman untuk channeling (menyalurkan) dan executing (mengelola)
- j. Anggota kelompok dwajibkan mengikuti asuransi jiwa untuk mengantisipasi kemacetan apabila terjadi hal yang tidak diharapakan
- i. Kelompok yang berhak mendapatkan dana perguliran adalah:
 - Kelompok lama yang tidak mempunyai tanggungan pinjaman ke
 Unit Pengelola Kegiatan (UPK), masih dianggap layak setelah
 dianalisa kemampuan kelembagaan dan kemampuan
 pengembalian, dinyatakan layak oleh tim verifikasi

- 2) Kelompok baru yang sedang atau tidak mempunyai tanggungan pinjaman ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan atau lembaga keuangan lainnya, dianggap layak setelah dianalisa kemampuan kelembagaan dan kemampuan pengembalian, dinyatakan layak oleh tim verifikasi
- j. Jika kelompok sudah sampai batas maksimal pinjaman, maka Unit Pengelola Kegiatan (UPK) akan memberikan rekomendasi agar kelompok tersebut akses ke lembaga keuangan diluar Unit Pengelola Kegiatan (UPK)
- k. Pinjaman tidak disalurkan ke kelompok yang mempunyai reputasi jelek
- Bagi kelompok yang bermaslah tidak dapat diberikan kembali pinjaman dana bergulir
- m. Bagi kelompok yang mempunyai *track record* baik maka diprioritaskan untuk didanai kembali, dan dapat diberikan *reward* (penghargaan yang jumlah dan bentuknya disesuaikan kemudian)
- 6. Proses peminjaman dana perguliran sesuai dengan pasal 15 yaitu:
 - Kelompok mengadakan pertemuan kelompok untuk menentukan calon pemanfaat dan besarnya pengajuan pinjaman
 - Kelompok mengajukan proposal pinjaman yang disahkan oleh kepala desa/lurah dengan melampirkan:
 - 1) Surat rekomendasi dari Kepala Desa /Lurah
 - 2) Daftar anggota kelompok
 - 3) Rencana kegiatan kelompok

- 4) Surat perjanjian bersama tanggung renteng
- 5) Daftar hadir anggota kelompok
- 6) Daftar calon Pemanfaat Simpan Pinjam Perempuan (SPP)
- 7) Rencana anggaran biaya
- 8) Rencana setoran dari kelompok yang masih berlaku
- 9) Photo copy KTP anggota kelompok yang masih berlaku
- 10) *Photo copy* keluarga yang masih berlaku
- 11) Surat pernyataan persetujuan dari anggota keluarga/penanggung jawab anggota
- 12) Peta lokasi kelompok
- 13) Administrasi lain yang diperlukan
- 14) Kelompok yang sudah mendapatkan pengesahan dari Kepala

 Desa/Lurah, jika terjadi kemacetan terhadap kelompok tersebut
 maka Kepala Desa/Lurah ikut bertanggung jawab
- 15) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) melakukan pemeriksaan berkas formulir permohonan yang diajukan oleh kelompok, jika ada kekurangan maka Unit Pengelola Kegiatan (UPK) mengembalikan kepada kelompok untuk dilengkapi atau diperbaiki dan diberikan jangka waktu paling lambat 7 hari untuk perbaikan berkas
- 16) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) meneruskan berkas ke tim *verifikasi* untuk dilakukan pemeriksaan lapangan, minimal 3 hari setelah berkas lengkap masuk
- 17) Setelah dilakukan proses *verifikasi*maka akan didapatkan kelompok layak dan kelompok tidak layak didanai(rekomendasi tim *verifikasi*)

- 18) Bagi kelompok yang tidak layak akan mendapatkan pembinaan dan penguatan
- 19) Untuk kelompok penyalur pinjaman *(channeling)*, batas usulan pinjaman per-anggota kelompok ditentukan berdasarkan skala usaha
- 7. Lembar kerja tim *verifikasi* merupakan bukti dari hasil analisa tim verifikasi yang secara hukum dapat dipertanggung jawabkan atas rekomendasi yang diberikan dan berisi tentang:
 - a. Analisa kualitatiff

Dalam analisa kualitatif yang perlu mendapatkan analisa secara mendalam meliputi:

- 1) Aspek usaha
- 2) Aspek pengelolaan
- 3) Aspek hubungan dengan lembaga lain
- 4) Aspek bahan baku
- 5) Aspek produksi
- 6) Aspek pemasaran
- 7) Aspek perekonomian
- 8) Aspek proyeksi usaha
- 9) Aspek jaminan
- 10) Aspek penilaian resiko
- b. Analisa kuantitatif
 - 1) Analisa laporan keuangan
 - 2) Analisa ratio
 - 3) Pernyataan laba rugi

- 4) Permodalan
- c. Analisa proyeksi keuangan
 - 1) Proyeksi arus kas
 - 2) Proyeksi laba rugi
 - 3) Proyeksi neraca

d. Evaluasi kebutuhan keuangan

Dalam melakukan evaluasi kebutuhan keuangan harus dapat memproyeksikan kapan dan berapa jumlah kekurangan/kebutuhan kas dan kelebihan kas, evaluasi kebutuhan keuangan ini dapat dihitung berdasarkan *cash flow* dengan jalan memperhatikan pentingnya sumber pendapatan lainnya. Sedangkan dalam melakukan perhitungan kebutuhan keuangan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Metode proyeksi arus kas
- 2) Metode perputaran modal kerja

e. Analisa yuridis

Berkenan dalam permohonan pinjaman yang akan diproses lebih lanjut. Tim verifikasi mengajukan persyaratan tanggung renteng tidak hanya sekedar pernyataan tapi dapat dijadikan pernyataan hukum masingmasing anggota, disertai dengan bahan-bahan untuk dilakukan analisa tentang keabsahan jaminan

- 2. Manfaat dan tujuan dari simpan pinjam perempuan (SPP) yaitu:
 - a. Memberikan kemudahan akses permodalan usaha baik kepada masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha

- b. Pelestarian dan pengembangan permodalan usaha yang berasal dari dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang sesuai dengan tujuan program
- Peningkatan kapasitas pengelola kegiatan dana bergulir ditingkat wilayah perdesaan
- d. Menyiapkan kelembagaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pengelola dana bergulir dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, transparan dan berkelanjutan
- e. Peningkatan pelayanan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam pemenuhan kebutuhan permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat

Sumber data primer Standar Operasional Prosedur (SOP), 2016

E. Tinjauan Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat

Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) membawa manfaat untuk penambahan modal usaha yang nantinya usaha tersebut dapat berkembang dan akan membantu pendapatan serta meningkatnya perekonomian keluarga Rumah Tangga Miskin (RTM). Tentunya manfaat yang dirasakan ini belum sesuai dengan tujuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yaitu untuk mengurangi rumah tangga miskin. Meskipun jika dilihat tujuannya sebagai pendanaan usaha skala mikro, dana tersebut digunakan tetapi bukan kepada sasaran yang tertera pada ketentuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Setiap kebijakan dibuat untuk mencapai tujuan tertentu. Dari berbagai bentuk tujuan kebijakantersebut, salah satunya selalu dimaksudkan untuk melakukan perubahan tentang berbagai hal. Sebagaimana indikator perubahan yang diinginkan pada implementasi kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini sesuai dengan tujuannya, yaitu pengurangan rumah tangga miskin secara statistik telah mengalami perkembangan penurunannya. Namun secara observasi yang tampak di lapangan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakatnya belum tercapai maksimal. Hal ini dikarenakan masih ditemukannya sebagian besar pemanfaat adalah kalangan non Rumah Tangga Miskin (RTM). Adanya rasa ketakutan dan kekhawatiran dari masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) untuk meminjam dikarenakan adanya kekeliruan pemahaman akan tujuan dari program, yaitu kelancaran program menjadi syarat untuk program fisik berikutnya.

Menurut Manulang perekonomian berasal dari kata ekonomi, istilah ekonomi mulai berasal dari perkataan Yunani yaitu "oikos" yang berarti rumah tangga "nomos" yang berarti aturan. Definisi yang umum tentang ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya dalam mencapai kemakmuran. Kemakmuran yang dimaksud dalam tulisan ini adalah suatu keadaan dimana manusia dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Sedangkan masyarakat menurut Koenjaningrat adalah "kesatuan hidup mahluk-mahluk manusia yang terikat oleh suatu sistem adat istiadat tertentu.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perekonomian masyarakat adalah peraturan atau pedoman bagi masyarakat dalam usahanya yang berhubungan dengan penghasilan atau pendapatan dan penggunaan materimateri yang dibutuhkan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memperoleh penghasilan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, manusia dituntut untuk berusaha sehingga tepat dengan apa yang dirumuskan tentang ekonomi oleh Paul A. Samuelson seorang ahli ekonomi AS bahwa "ekonomi adalah study mengenai orang-orang dalam kehidupan bisnis mereka yang biasa mencari nafkah dan menikmatinya.

Dari penjelasan tersebut jelaslah bahwa untuk memperoleh kehidupan yang layak orang harus berusaha untuk mencari nafkah atau biaya hidup mereka dan memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sedangkan kesejahteraan perekonomian bagi masyarakat merupakan suatu kondisi terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup manusia, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan.

F. Kerangka Berfikir

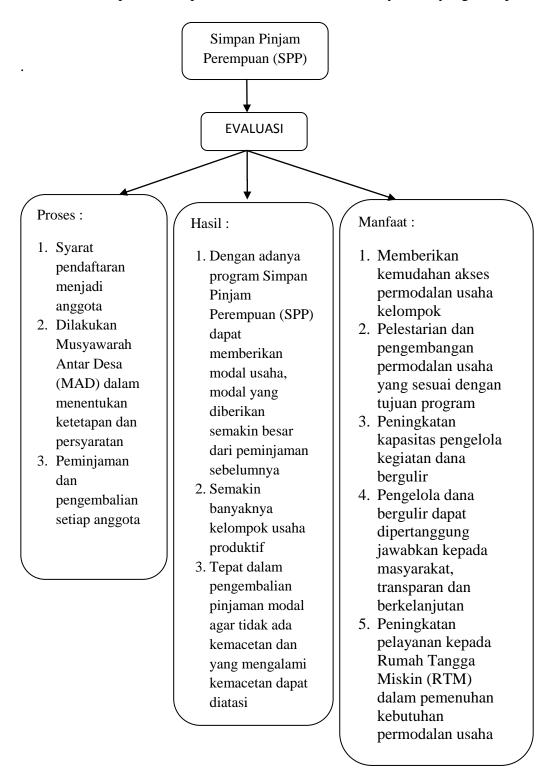
Sejauh ini telah banyak program yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani masalah kemiskinan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan merupakan program pemerintah yang hadir di tengah-tengah masyarakat perdesaan dengan ekonomi lemah. Tujuan Umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya kesejahteraan

dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Kegiatan yang dilakukan meliputi pembangunan sarana desa untuk masyarakat, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan kegiatan dana bergulir.

Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dana bergulir ini dapat dilihat dari proses yang dimana prosesmenjadidasarpersyaratan dan tahapan untuk menjadi anggota yang telah diatur dalam ketetapan melalui Musyawarah Antar Desa (MAD), setelah menjadi anggota maka akan ada hasil yang diperoleh oleh anggota untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat, dan melakukan evaluasi setiap tahun dimana evaluasi ini dilakukan sesuai dengan ketetapan Musyawarah Antar Desa (MAD) agar semakin maju dan tetap stabil, maka akan mendapatkan manfaat bagi anggota Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Tingkat keberhasilan kegiatan (SPP) dapat dilihat dari ketepatan penggunaan pinjaman dan peningkatan pendapatan. Maksudnya semakin besar pinjaman yang diberikan maka semakin besar pendapatan yang diperoleh yang telah diatur oleh ketetapan aturan Musyawarah Antar Desa (MAD).

Adanya proses, hasil, manfaat, maka terbentuknya pemberdayaan masyarakat yang merupakan upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. pemberdayaan masyarakat didasari oleh adanya kesadaran bahwa setiap masyarakat memiliki kapasitas diri yang

berbeda-beda, dimana dengan kapasitas itu masyarakat dapat meningkatkan kemandirian dan kekuatan-kekuatan lokal yang pada akhirnya akan membawa pada suatu perubahan sosial ekonomi masyarakat yang baik pula.



Gambar 1. Kerangka Pikir

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007), metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut Ridjal (Bugin, 2001), metode kualitatif bertujuan untuk menggali atau membangun situasi proposisi atau menjelaskan makna dibalik sebuah realita.

Tipe penelitian kualitatif dirasa tepat digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan tentang Evaluasi Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat adalah *Empiris* yaitu adalah penelitian berdasarkan fakta–fakta yang ada di dalam masyarakat mengenai proses tahapan dan syarat menjadi anggota simpan pinjam perempuan (SPP), manfaat yang diperoleh menjadi anggota simpan pinjam perempuan (SPP), evaluasi yang dilakukan dalam melaksanakan program simpan pinjam perempuan (SPP) ini dilakukan pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah diatur oleh ketetapan aturan

Musyawarah Antar Desa (MAD), dan hasil pelaksanaan program simpan pinjam yang bergulir dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat di Kabupaten Pringsewu.

B. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di Kecamatan Sukoharjo yang merupakan wilayah Kabupaten Pringsewu. Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini karena meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian diadakannya program PNPM Mandiri di Kabupaten Pringsewu.

C. Fokus Penelitian

Menurut Moleong, (2005). Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan, dengan demikian dalam penelitian kualitatif hal yang harus diperhatikan adalah masalah dan fokus penelitian karena fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data sehingga dengan batasan ini peneliti akan fokus memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian.

Penelitian ini difokuskan pada proses dimana proses ini dilihat dari bagaimana prosedur dan persyaratan pendaftaran menjadi anggota Simpan Pinjam Perempuan (SPP), hasil yang diperoleh menjadi anggota Simpan Pinjam Perempuan (SPP), manfaat yang dieperoleh Anggota Simpan Pinam Perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat

dengan adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Khususnya Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik yang digunakan teknik *purposive sampling* merupakan informan yang dipilih dengan tujuan dan pertimbangan tertentu. Menurut Moleong (2006), informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi informan dipilih secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yakni mereka yang dianggap berkompeten, memenuhi persyaratan atau kriteria untuk dijadikan informan.

Khususnya untuk Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dana bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dalam Meningkatkan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyrakat pada Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu ini memerlukan informan yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian guna memperoleh data dan informasi yang lebih akurat.

Adapun informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah 2 orang pengurus dan ketua pengelola program Simpan Pinjam Perempuan (SPP), 8 orang anggota program Simpan Pinjam Perempuan (SPP), 1 orang masyarakat yang juga terlibat dan merasakan dari adanya program Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Tabel 2. Profil Informan

No	nama	Usia (tahun)	Tingkat pendidikan	Jumlah anak	Pekerjaan	Jabatan
1	Rustamadi	43	SMA	2	Petani	Ketua BKAD
2	Arif Sultoni	40	SLTA	4	Petani	Ketua UPK
3	Dwi Isnawati	36	SMA	4	Mebel dan Warung Sembako	Anggota SPP
4	Ning	37	SLTA	4	Pengrajin Kain Perca	Anggota SPP
5	Ngatinah	50	SLTA	4	Budidaya ikan dan usaha karet	Anggota SPP
6	Marjiah	43	SD	6	Petani	Anggota SPP
7	Hesti	28	SMA	3	Pedagang	Anggota SPP
8	Ngatemi	47	SD	7	Pedagang	Anggota SPP
9	Susmiyati	46	SARJANA	3	PNS	Anggota SPP
10	Santi	30	D3	2	Pedagang	Masyarakat
11	Sri	35	SLTA	3	Pedagang	Anggota SPP

Sumber: Hasil Wawancara Tahun 2016

Proses penelitian ini dilakukan dengan sering melakukan observasi di Kecamatan Sukoharjo. Dari hasil observasi peneliti menemukan orang yang menurut peneliti tepat dijadikan informan dalam penelitian ini. Informan Rus merupakan ketua BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) program Simpan Pinjam Perempuan (SPP), AS merupakan ketua UPK (Unit Pengelola Kegiatan) program Simpan Pinjam Perempuan (SPP), informan Dwi, Ning, Ngatinah, Marjiah, Hesti, Ngatemi, Susmiyati, Sri merupakan ketua dan anggota dari masing-masing kelompok program Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Santi merupakan masyarakat sekitar yang merasakan adanya program

Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Dengan berbagai macam usaha yang mereka jalani mayoritas pekerjaan sebagai pedagang, mebel, warung sembako, dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, atas dasar konsep tersebut, maka ketiga teknik pengumpulan data di atas digunakan dalam penelitian ini.

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik penelitian yang sangat penting. Pengamatan itu digunakan karena berbagai alasan. Ternyata ada beberapa tipologi pengamatan. Terlepas dari jenis pengamatan, dapat dikatakan bahwa pengamatan terbatas dan tergantung pada jenis dan variasi pendekatan (Moleong, 2007). Penulis melakukan pengamatan di Kecamatan Sukoharjo untuk mengetahui permasalahan awal terkait variable penelitian.

2. Wawancara

Menurut Moleong, (2007) wawancara mendalam adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan pewawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Menurut Arikunto (2007) Peneliti harus mencatat teknik yang mana

kondisi dan situasi yang mana mendukung penerimaan informasinya yang paling tepat. Sebaiknya pada waktu uji coba, digunakan tape recorder Peneliti mengadakan tanya jawab untuk memperoleh data. Wawancara mendalam ini dilakukan secara terbuka dengan mengarah pada persoalan penelitian. Peneliti melakukan wawancara dengan mendatangi informan di tempat tinggalnya atau ditempat kerja.

3. Dokumentasi

Menurut Arikunto(2007), dokumentasi yaitu mencari data mengenai halhal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, foto dan sebagainya.

Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen baik yang berada di sekolah ataupun yang berada berada diluar sekolah, yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Faisal, 2001 dan Moleong 2001 menyatakan bahwa pengumpulan data, reduksi data, display data, dan verifikasi atau pengambilan kesimpulan bukan suatu yang berlangsung secara linear, tetapi bersifat simultan atau siklus yang interaktif. Dapat disimpulkan bahwa, untuk melakukan analisis data peneliti harus mengikuti langkah-langkah, sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pengumpulan data penelitian, seorang peneliti dapat menemukan kapan saja waktu untuk mendapatkan data

yang banyak, apabila peneliti mampu menerapkan metode observasi, wawancara atau dari berbagai dokumen yang berhubungan dengan subjek yang diteliti. Maknanya pada tahap ini, si peneliti harus mampu merekam data lapangan dalam bentuk catatan-catatan lapangan (*field note*), harus ditafsirkan, atau diseleksi masing-masing data yang relevan dengan fokus masalah yang diteliti.

2. Melaksanakan Display Data atau Penyajian Data

Penyajian data kepada yang telah diperoleh ke dalam sejumlah matriks atau daftar kategori setiap data yang didapat, penyajian data biasanya digunakan berbentuk teks neratif. Biasanya dalam penelitian, kita mendapatkan data yang banyak. Data yang kita dapat tidak mungkin kita paparkan secara keseluruhan. Untuk itu, dalam penyajian data peneliti dapat dianalisis oleh peneliti untuk di susun secara sistemtis, atau simultan sehingga data yang diperoleh dapat menjelaskan atau menjawab masalah yang diteliti. Maka dalam display data, peneliti disarankan untuk tidak gegabah mengambil kesimpulan.

3. Mengambil Kesimpulan/Verifikasi

Mengambil keputusan merupakan analisis lanjutan dari reduksi data, dan display data sehingga data dapat disimpulkan, dan peneliti masih berpeluang untuk menerima masukan. Penarikan kesimpulan sementara, masih dapat diuji kembali dengan data di lapangan, dengan cara merefleksikan kembali, peneliti dapat bertukar pikiran dengan teman sejawat, triangulasi, sehingga kebenaran ilmiah dapat tercapai. Bila proses

siklus interaktif ini berjalan dengan kontinu dan baik, maka keilmiahannya hasil penelitian dapat diterima. Setelah hasil penelitian telah diuji kebenarannya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan dalam bentuk deskriptif sebagai laporan penelitian.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografis Kecamatan Sukoharjo

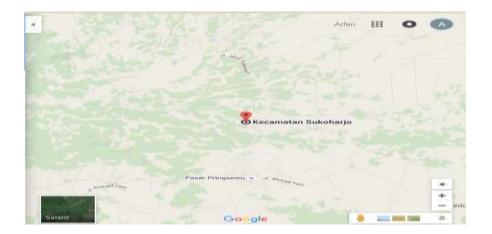
Keadaan geografis dalam penelitian ini menyajikan gambaran tentangletak administratif danluas wilayah Kecamatan Sukoharjo

1. Letak Administratif

Secara administratif Kecamatan Sukoharjo termasuk kedalam wilayah Kabupaten Pringsewu.Kecamatan Sukoharjo terbagi kedalam 16 pekon. Adapun batasan-batasan administratif Kecamatan Sukoharjo adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Adiluwih
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pringsewu
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Banyumas
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Negri Katon, Kabupaten Pesawaran

Berikut adalah peta Kecamatan Sukoharjo sesuai dengan data monografi Kecamatan SukoharjoPeta kecamatan sukoharjo



Sumber: Google maps.2016



Sumber: https://www.google.co.id/

Gambar2.Peta kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu berdasarkan google maps.

Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini secara administratif berdekatan dengan Kabupatenpringsewu. Kecamatan Sukoharjo ini memiliki sarana dan prasarana yang cukup baik dalam bidang transportasi. Sarana transportasi yang dimiliki yaituterdapat angkutan perdesaan, truck umum, ojek. Prasarana transportasi yang dimiliki yaitu jalan beraspal. Kecamatan Sukoharjo sebagai daerahpenghubung dari desa —desa lain yang ada di Kecamatan Sukoharjo atau berada pada daerah stratgis yang menjadi akses jalur transportasi untuk daerah lain.

2. Luas Wilayah

Kecamatan Sukoharjo terletak didaerah dataran rendah. Luas wilayah Kecamatan Sukoharjo 72,95 Ha. Adapun perincian penggunaanlahan adalah persawahan, ladang, pekarangan, perkebunan rakyat, kolam/empang, dan lainnya. Berikut ini tabel penggunaan lahan di Kecamatan Sukoharjo.

Tabel 3. Luas Kecamatan Sukoharjo Menurut Penggunaan Tanah Tahun 2015

No	Penggnaan Tanah Ground Use	Luas (Ha) Wide (Ha)	Presentase Persentage (%)
1	Persawahan	11,82	16,20
2	Ladang	33,76	46,28
3	Pekarangan	9,97	13,67
4	Perkebunan Rakyat	14,47	19,84
5	Kolam/Empang	0,17	0,23
6	Lainnya	2,76	3,78
	Jumlah	72,95	100,00

Sumber: Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kecamatan Sukoharjo

Source: Agricultural and Food Crop of Sukoharjo Subdistric

Berdasarkan data tabel 3 menunjukkan bahwa penggunaan lahan persawahan, ladang, dan perkebunan rakyat masih cukup tinggi yaitu mencapai lebih dari setengah luas wilayah Kecamatan Sukoharjo (82,32%) dari luas wilayah Kecamatan Sukoharjo. Menunjukkan bahwa Kecamatan Sukoharjo memiliki potensi sumber daya alam yang cukup tinggi.

3. Keadaan Sosial Ekonomi Kecamatan Sukoharjo

Secara sosial ekonomi letak Kecamatan Sukoharjo terhadap lalu lintas perdagangan cukup strategis. Hal ini dikarenakan jarak dari desa ke desa yang lain tidak jauh dari pasar dan jarak ke ibukota kabupaten hanya 10 km.

Kecamatan Sukoharjo berada dijalur transportasi dan dilalui oleh angkutan umum antar kecamatan / daerah / provinsi , sehingga memberi kemudahan mobilitas orang dan barang, hal ini tentu berdampak positif terhadap kondisi ekonomi masyarakat, misalnya dampak positif pada Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP), yang dimana program ini sangan membantu masyarakat bahkan koperasi lain untuk peminjaman dana usaha bagi kelompok perempuan di Kecamatan Sukoharjo.

Pekon Sukomulyo selain menjadi akses transportasi juga sebagi daerah penghasil perkebunan, pertanian, perikanan, dan peternakam. Hasil dalam setiap panen perkebunan mencapai 60 ton (terdiri dari perkebunan kelapa sawit, cokelat, karet, dan kelapa). Sedangkan hasil pertanian (jagung, padi sawah, ubi kayu, cabai dan lain-lain) mencapai 120 ton. Perikanan

(terdiri dari ikan lele, ikan mas, gurameh, nila, dan lain-lain) mencapai 70 ton.serta hasil dari peternakan mencapai 62,226 ekor (terdiri dari ayam, bebek, kambing, domba, itik, sapi, kerbau) perhitungan dalam satu tahunnya.

4. Sejarah Berdirinya Kecamatan Sukoharjo

Daerah sukoharjo pada awalnya merupakan daerah kolonialisme yang dibuka pertama kali pada tanggal 23 Agustus 1938 oleh serombongan kolonialis yang berasal dari pulau jawa yang dipimpin oleh Suharjo Wiryo Pranoto untuk rombongan pertama dan rombongan kedua dipimpin oleh Suharjo Wardoyo. Nama Sukoharjo sendiri diambil dari kedua tokoh tersebut. Adapun secara pergantian camat di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut:

No	Nama	Tahun
1	Amir Hamzah	Tahun 1970-1972
2	Abu Nawas	Tahun 1972-1973
3	Sarwahi, BA	Tahun 1973-1975
4	Rukiyat Kusuma Yudha	Tahun 1975-1977
5	Kusnadi	Tahun 1977-1979
6	Idris Ibrahim	Tahun 1979-1982
7	Rahman Zein,BA	Tahun 1982-1987
8	Drs.Suparjo	Tahun 1987-1989
9	Suepomo, SM. HK	Tahun 1989-1991
10	Hasdidi Thoyib, BA	Tahun 1991-1992
11	Hasanduddin Basyir, BA	Tahun 1992-1994
12	Drs. Rahman Sakti	Tahun 1994-1998
13	Drs. Ahyani Mukhsin	Tahun 1998-1999
14	Haira Razi Azaz	Tahun 1999-2000
15	Firman Muntako, BA	Tahun 2000-2001
16	Drs. Z. Fanani	Tahun 2001-2004
17	Drs. Heksus Nahrawi	Tahun 2004-2005
18	Rusdi Hasan, BA	Tahun 2005-2005
19	Drs. H.Arifin Basroni, MM	Tahun 2005-2007
20	Suryanto, S.Ag	Tahun 2007-2008
21	Dra. D.M. Fitri	Tahun 2008-2009

22	Suryanto, S.Ag	Tahun 2009-2010
23	Drs. Sunargiati, M.Pd	Tahun 2010-1010
24	Drs.Muhammad Dawan Raharjo, M.Si	Tahun 2011-1012
25	Edi Sumber Pamungkas, S. Sos	Tahun 2010-2011
26	Wasiman Johani	Tahun 2012-2013
27	Basroni, S.E	Tahun 2013-sekarang

5. Keadaan penduduk Kecamatan Sukoharjo

Keadaan pendudukyang diuraikan dalam penelitian ini adalah semua yang terkait dengankeadaan penduduk yang ada di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.

a. Jumlah penduduk

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk kecamatan Sukoharjo adalah 47.217 jiwa. Data distribusi penduduk dibagi menjadi dua, jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan jumlah penduduk berdasarkan umur. Berdasarkan jenis kelamin ditunjukan pada tabel

Tabel 4. Distribusi Jumlah Penduduk Kecamatan Sukoharjo Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk	Presentase %
1	Laki-laki	23,127	48,99%
2	Perempuan	24,090	51,01%
	Jumlah	47.217	100,00

Sumber: Koordinator Statistik Kecamatan Sukoharjo

Berdasarkan data dari tabel 4 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Data ini menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Sukoharjo memiliki sumber daya perempuan yang cukup tinggi dibandingkan laki-laki. Dari data tersebut juga dapat diperoleh (Sex Ratio) yang

berarti bahwa di Kecamatan Sukoharjo pada tahun 2015 setiap ada 100 penduduk perempuan terdapat 96 penduduk laki-laki.

Data monografi berdasarkan jumlah penduduk Kecamatan Sukoharjo berdasarkanumur dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 5. Distribusi Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

No	Usia (tahun)	Jumlah (Jiwa)	Presentase (%)
1	0-6	2,497	5,29
2	7-12	3,875	8,21
3	13-15	4,381	9,28
4	16-18	5,898	12,49
5	19-26	8,469	17,94
6	27-55	6,837	14,47
7	56-59	9,864	20,89
8	>60	5,396	11,43
	Jumlah	47,217	100,00

Sumber: Pekon dan Kelurahan se-Kecamatan Sukoharjo

Berdasarkan data dari tabel5 diatas penduduk berumur kurang dari 15 tahun cukup besar yaitu 22,78 %. Ini perlu menjadi perhatian karena 5 tahun mendatang kelompok ini akan menjadi entry tenaga kerja baru yang memerlukan skill dan kualitas SDM yang memadai. Jumlah usia produktif di Kecamatan Sukoharjo yaitu pada kelompok umur antara 15-59 tahun dengan komposisi terbesar yaitu 65,79 %. Dan usia non produktif sebesar 11,43%. Ini membuktikan bahwa Kecamatan Sukoharjo sangat beruntung karena memiliki usia produktifyang cukup tinggi. Jadi jika *dependency ratio* di Kecamatan Sukoharjo pada tahun 2015 adalah dalam 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung beban 51 orang penduduk usia non produktif. Artinya, bahwa dalam mencari nafkah atau usaha selain untuk memenuhi

kebutuhan hidup dirinya sendiri, juga harus dapat menanggung kebutuhan hidup orang lain.

b. Komposisi Penduduk Dalam Kelompok Etnis/Suku

Berdasarkan data jumlah etnis penduduk Kecamatan Sukoharjo adalah lima etnis/suku diantaranya lampung, jawa, sunda batak, palembang. Berikut ini tabel komposisi penduduk dalam etnis/suku

Tabel 6. Komposisi penduduk menurut etnis/suku

No	Etnis/ suku	Jumlah	Presentase (%)
1	Lampung	7,183	15,21
2	Jawa	29,781	63,07
3	Sunda	3,796	8.04
4	Batak	1,429	3,03
5	Palembang	5,028	10,65
	Jumlah	47,217	100,00

Sumber: Pekon dan Kelurahan se-Kecamatan Sukoharjo

Berdasarkan data dari tabel 6 diatas dapat diuraikan bahwa mayoritas penduduk Kecamatan Sukoharjo adalah etnis jawa, terdapat lebih dari setengah penduduk yang ada di Kecamatan Sukoharjo (63,07%) yang berjumlah 29,781 orang. Etnis lampung diposisi kedua dengan jumlah presetase 15,21%. Etnis Palembang diposisi ketiga dengan presentase 10,65% yang berjumlah 5,028 orang. Etnis sunda diposisi keempat dengan presentase 8,04% yang berjumlah 3,796 orang. Penduduk minoritas etnis Batak dengan presentase 3,03% yang berjumlah 1,429 orang.

c. Komposisi Penduduk Menurut Agama

Komposisi penduduk Kecamatan Sukoharjo menurut agama dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. Komposisi Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Jumlah (orang)	Presentase (%)
	Islam	44,824	94,93
	Kristen	560	1,18
	Katolik	1,231	2,61
	Hindu	571	1,22
	Budha	31	0,06
	Jumlah	47,217	100,00

Sumber: Pekon dan Kelurahan se-Kecamatan Sukoharjo

Berdasarkan tabel 7 diatas dapat diuraikan bahwa mayoritas penduduk Kecamatan Sukoharo adalah pemeluk agama Islam dengan jumlah hampir dari jumlah penduduk yang ada. Tempat peribadatan yang dimiliki Kecamatan Sukoharjo Masjid 57, Mushola 67, Gereja Kristen 1,Gereja Katolik 5, Pura 1.

d. KomposisiPenduduk Menurut Pekerjaan

Komposisi penduduk Kecamatan Sukoharjo Bedasarkan mata pecaharian dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 8. komposisi penduduk menurut pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah (orang)	Presentase (%)
1	Petani	11,073	35,94
2	Pedagang	6,490	21,06
3	PNS	515	1,67
4	Pengrajin	389	1,28
5	Peternak	863	2,80
6	Montir	20	0,06
7	Dokter	5	0,01
8	Bidan	29	0,09
9	Mantri	5	0,01
10	TNI/POLRI	45	0,15
11	Pensiunan	96	0,32

No	Pekerjaan	Jumlah (orang)	Presentase (%)
12	Swasta	548	1,79
13	Buruh	2,856	9,28
14	Sopir	128	0,41
15	Dosen	8	0,02
16	Buruh tani	5,892	19,12
17	Lain-lain	1,845	5,99
	Jumlah	30,807	100,00

Sumber: Pekon dan Kelurahan se-Kecamatan Sukoharjo

Berdasarkan dari tabel 8 diatas mayoritas penduduk Kecamatan Sukoharjo masi bermatapencaharian di bidang pertanian, baik itu petani maupun buruh tani.Pada tabelpun menunjukkan bahwa 55,06% wilayah Kecamatan Sukoharjo dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan dan pertanian.Pemanfaatan lahan tersebut berupa tanaman pangan terdiri dari perkebunan terdiri dari perkebunan kelapa sawit, cokelat, karet, dan kelapa dan lain-lain).Sedangkan hasil pertanian (jagung, padi sawah, ubi kayu, cabai dan lain-lain).Penduduk yang bekerja dibidang jasa mencapai 24,95%).

6. Keadaan Ekonomi

Kecamatan Sukoharjo sebenarnya memiliki banyak potensi dalam menunjang perekonomian masyarakat, seperti dibidang persawahan, ladang, perkebunan rakyat, pekarangan, pertenakan, perikanan, dan bidang jasa (transportasi, industri, dan perdagangan). Tetapi belum mampu dioptimalkan secara baik guna menunjang kesejahteraan masyarakat.

Data monografi Kecamatan Sukoharjo pada tingkat Kesejahteraan penduduk dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 9.Data monografi Kecamatan Sukoharjo pada tingkat Kesejahteraan penduduk

No	Keterangan	Jumlah (KK)	Presentase (%)
1.	Sejahtera	9,744	74,65%
2.	Sejahtera I	3,309	23,35%
	Jumlah	13,053	100,00

Sumber: Pekon dan Kelurahan se-Kecamatan Sukoharjo

Dari data tabel 9 diatas menunjukan hanya 74,65% untuk keluarga Sejahtera.Hal ini menunjukan bahwa penduduk Kecamatan Sukoharjo mampu dikatakan telah berada pada tingkat penduduk sejahtera.Penduduk pada tingkat sejahteraI berjumlah 23,35%.

7. Pemerintahan Kecamatan Sukoharjo

Suatu pemerintahan baik desa maupun daerah memiliki sebuah struktur yang dibentuk sesuai dengan kebutuhannya. Pemerintahan Kecamatan Sukoharjo tentunya dibuat untuk kemajuan dan pembangunan Kecamatan Sukoharjo.

CAMAT BASRONI, SE NIP. 196205061961031015 DINAS / INSTANSI **SEKCAM** Drs. JOKO HERMANTO, MM. NIP.19661222 199003 1 005 KASUBAG KASUBAG KASI KASI KASI PEMERINTAHAN TRANTIP PERENCA PELAYANAN **UMUM** NAAN DAN DAN KEUANGAN KEPEGAWAIAN SEPTI ROHADAN,SE YAZID SUPRIADI,SH **ERLY** NIP.197105061992032 YUNIARNI.SE NIP.196110211986 NIP.196707071992 NIP.1964070319860 0 05 031 007 031012 NIP.19740716199 31008 3032003

Sumber: Kantor Camat Sukoharjo

Struktur Pemerintahan Kecamatan Sukoharjo

Gambar 3.Struktur Pemerintahan Kecamatan Sukoharjo

Pemerintahan Kecamatan Sukoharjo dipimpin oleh seorang Camat. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekertaris camat, kasi pemerintahan, kasi trantip, kasubag perencaan dan keuangan, kasi pelayanan, kasubag umum dan kepegawaian. Para pejabat menjalankan tugasnya sesuai dengan jabatan masing-masing. Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini termasuk dalam bagian Kasi Pemerintahan karena bagian dari program dan aturan pemerintah.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa program Simpan Pinjam Perempuan Kecamatan Sukoharjo ini sangat membantu kelompok perempuan yang memilki usaha, dengan bantuan modal yang diterima sesuai dengan kebutuhan. Adapun evaluasi (proses, hasil, manfaat) yang dijalankan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Sasaran bantuan program Simpan Pinjam Perempuan ini adalah Rumah Tangga Miskin (RTM) agar dapat mengembangkan usaha, menghasilkan keuntungan yang besar, memberikan lapangan pekerjaan untuk kelompok perempuan yang lainnya. Suku bunga yang harus dibayarkan hanya 1,5 % ini sangat kecil tanpa jaminan, hanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang menjadi bukti bahwa melakukan pinjaman, besarnya peminjaman sesuai kebutuhan dimulai dari Rp. 2.000.000 sampai Rp. 100.000.000. hal ini dilakukan dengan menggunakan proses dan syarat-syarat tertentu.

Adapun hasil dari adanya program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah:

 Dapat membantu Rumah Tangga Miskin (RTM) yang memiliki usaha produktif untuk mengembangkan aneka usaha yang sudah ada

- Memberi kemudahan akses permodalan usaha baik kepada masyarakat sebagai pemanfaat kelompok usaha
- 3. Menambah kesempatan kerja
- 4. Menumbuhkembangkan usaha produktif dan kelompok perempuan
- Mempertinggi kualitas sumberdaya manusia dan kelompok untuk mencapai masyarakat yang sejahtera
- 6. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat
- 7. Menumbuhkan rasa persaudaraan yang saling membutuhkan satu sama lainnya

Bantuan dana modal usaha ini diharapkan agar berjalan terus menerus dan lancar tanpa ada kemacetan, jika ada kemacetan diatasi dengan kantor Kejaksaan Kabupaten Pringsewu, karena tim pengurus sudah bekerjasama dengan kantor Kejaksaan Kabupaten Pringsewu. Ini dilakukan agar anggota yang meminjam tidak semena-mena dalam mengembalikan dan menggunakan modal usaha yang sudah ada. Memperbaiki masalah-masalah yang sudah ada sebelumnya, mengantisipasi agar tidak ada anggota yang kabur.

Kelancaran dan keuntungan menjadi hal yang sangat penting dalam menjalankan usaha, iika usaha dijalankan maka tidak akan yang lancar ada kemacetan,pengembalian pinjaman tepat waktu akan membuat modal semakin meningkat, ini dapat membantu kelompok perempuan lainnya yang akan meminjam, agar modal ini dapat bergulir. Pengembalian tepat waktu akan mendapatkan (IPTW) Insentif pengembalian Tepat Waktu untuk setiap kelompok ini memberikan bunga yang cukup untuk menambah uang kas setiap kelompok.

Keuntungan diharapkan bagi kelompok usaha, keuntungan inilah yang menjadi penyemangat kelompok perempuan dalam menjalankan usaha, dan keuntungan yang diperoleh semakin meningkat.Hal ini di lakukan dengan melakukan pendampingan setiap bulannya baik itu yang diadakan pengurus maupun anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP).Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Sukoharjo ini dapat berkembang dan semakin maju baik dari usaha anggota maupun Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Sukoharjo.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberika beberapa saran, yaitu:

- Program Simpan Pinjam Perempuan ini bisa dijalankan terus agar kelompok masyarakat yang sudah maupun belum juga dapat merasakan dan ingin menjalankan usaha yang lebih produktif dan kreatif
- 2. Hubungan antar anggota saling berhubungan dan melengkapi satu sama lainnya, kekurangan anggota saling menutupi agar tidak ada perselisihan
- Pendampingan dan bimbingan setiap bulan yang rutin dilakukan agar usaha tetap lancar tanpa ada kemacetan
- 4. Pengembalian tepat waktu dana pinjaman akan mempermudah kelompok lain untuk meminjam modal usaha mereka
- 5. Anggota Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini dapat menambah wawasan yang luas tentang dunia usaha, mengelola usaha, dan pengalaman dalam menjalankan usaha mereka

- 6. Anggota Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini dapat mematuhi semua proses, hasil yang diperoleh, dan manfaat yang akan diperoleh oleh kelompok, agar usaha yang dijalankan akan semakin meningkat.
- 7. Anggota Simpan Pinjam Perempuan (SOP) diberi masukan agar keberhasilan dapat diperoleh dalam menjalankan usaha-usaha tersebut.
- 8. Diharapkan untuk peneliti agar pengurus dan pengelola program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dapat memberikan pengarahan kepada kecamatan lain yang belum maju seperti kecamatan Sukoharjo.

DAFTAR PUSTAKA

- Edi Suharto, Ph. D. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis Pembagunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Iskandar, Dr. 2010. Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif). Jakarta: Gaung Persada Press.
- Bungin, Burhan (2001) Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif. Yogyakarta:Gajah Mada Press.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta. Balai Pustaka. Jones, Thomas. 1994.
- Moleong, Lexy J. (2007) Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit PT Remaja RosdakaryaOffset, Bandung
- Moleong, Lexy J. 2001. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Moleong, Lexy J. 2005. Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- -----, Lexy J., (2001), Metodologi Penelitian Kualitatif, bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Suharto, Edi. 2005. Pekerjaan Sosial Industri, CSR yang Efektif, Alfabeta, Bandung.
- -----, Edi. 2006, Analisa Kebijakan Publik–Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial, Bandung : alfabeta
- Sulistiani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sutrisno R. 2001. *Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Pembebasan Kemiskinan*. Philosophy Press bekerja sama Fakultas filsafat UGM. Yogyakarta.

- Theresia, Dr. Aprilia dkk. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: ALFABETA.
- Usman, Husaini dkk. 2009. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara.
- Iskandar. 2010. Metodologi Penelitian Pendidikan dan sosial (Kuantitatif dan Kualitatif). Jakarta: Gaung Persada Press.

Sumber Internet:

- https://pnpmperdesaanpringsewu. wordpress. com/2013/09/03/antusias-masyarakat-pekon-di-jejama-secancanan-kabupaten-pringsewu-kunci-sukses-pembangunan-bersama-pnpm-mandiri-perdesaan/. (diakses pada Tanggal 18 februari 2016 pukul 11. 00 WIB)
- Alfiah Rahmawati alv_fie@yahoo. com Su Rito Hardoyo surito@ugm. ac. id. Evaluasi pelaksanaan program kredit mikro spp pnpm-mp di desaGirimargo kecamatan miri kabupaten sragen. http://webcache. googleusercontent. com/search?q=cache:a00OOIJ5GicJ:etd. repository. ugm. ac. id/downloadfile/79379/potongan/conclusion. pdf+&cd=1&hl=id&ct cnk. (diakses pada Tanggal 18 februari 2016 pukul 11. 00 WIB)
- Damianus ding. 2014. Studi tentang efektivitas pelaksanaanProgram nasional pemberdayaanMasyarakat mandiri perdesaan (pnpm-mp)Di desa noha boan kecamatan long apariKabupaten mahakam ulu. http://ejournal. an. fisipunmul. ac. id/site/wp-content/uploads/2015/08/jurnal%20%2808-24-15-10-1705%29. pdf(diakses pada Tanggal 18 februari 2016 pukul 11. 00 WIB)
- Rully khoiruddin. Dampak program nasional pemberdayaan masyarakat Mandiri perdesaan (pnpm-mp) program simpan pinjam perempuan (spp) terhadap kesejahteraan keluarga Di desa canga'an kecamatan kanor kabupaten bojonegoro.
- Pendidikan Non Formal Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. http://ejournal. unesa. ac. id/article/17090/14/article. pdf. (diakses pada Tanggal 18 februari 2016 pukul 11. 00 WIB)
- http://ejournal. ip. fisip-unmul. ac. id/site/wp-content/uploads/2014/08/Jurnal%20Damianus%20Ding%20%2808-29-14-01-47-10%29. pdf. (diakses pada Tanggal 18 februari 2016 pukul 11. 00 WIB)
- I gusti putu putra. 2015. Efektivitas dan dampakProgramNasionalPemberdayaan masyarakat mandiri perDesaan(pnpm-mpd) TerhadAp peningkatanKesejahteraan Dan kesempatan kerja rumahTangga sasaran di kecamatan abiansemalKabupaten badung. http://www.pps. unud. ac.

- id/thesis/pdf_thesis/unud-1305-462155999-igustiputuputra. pdf. (diakses pada Tanggal 18 februari 2016 pukul 11. 00 WIB)
- http://www. Pnpm-mandiri. Org (diakses pada tanggal 21 februari 2016 pukul 12. 30 WIB).
- http://palitopiaman. blogspot. co. id/2013/10/konsep-dasar-pnpm-mandiri perdesaan. html (diakses pada tanggal 28 februari 2016 pukul 10. 00 WIB).
- https://www.google.co.id/maps/place/Kec.+Sukoharjo, +Kabupaten+Pringsewu,+Lampung/@5. 2958927, 104. 9067576, 12z/data=!4m2!3m1!1s0x2e473384dc6ac7b7:0x22cc7d00ffcc3a8c (diakses pada tanggal 28 maret 2016)
- http://www. bpspringsewukab. go. id (diakses pada tanggal 28 maret 2016)
- https://www. google. co. id/search?q=peta+lokasi+kecamatan+sukoharjo+kabupaten+pringsewu&esp v=2&biw=1280&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0a hUKEwj03Yqfpf7NAhUMso8KHY4DAsQQsAQIJw#imgrc=pCdtxjqxTFS -BM%3A. (diakses pada tanggal 18 juni 2016)